

Kisruh Gaduh Pemilu: Gerakan *People Power*

Novance Silitonga
Direktur Populus Institut

Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden telah berlangsung, rakyat menanti *real count* atau penghitungan resmi oleh lembaga otoritas penyelenggara pemilu. Tampaknya para vokalis kedua pasangan calon masih saja berdebat dan saling klaim sebagai pemegang mandat rakyat (presiden terpilih). Saling nyinyir dan olok-olok “siapa presiden” menjadi senandung politik. Bersamaan dengan ini, para penyelenggara pemilu jatuh berguguran. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, secara sinis menyebut, tidak ada orang meninggal gara-gara kelelahan. Pernyataan seperti ini disebut *sofistri*, sebuah penalaran yang masuk akal namun keliru. Benar tidak ada orang meninggal gara-gara kelelahan tetapi faktor utamanya bukan kelelahan, melainkan ada riwayat penyakit yang cukup parah secara medik.

Sontak pernyataan tersebut ditafsirkan secara luas oleh masyarakat sebagai tindakan yang disengaja oleh pihak-pihak yang menginginkannya. Tuduhan seperti dibunuh, diracun, diguna-guna (mistik) sudah mulai terdengar. Tuduhan seperti ini dapat dipastikan mengada-ada dan omong kosong. Kemenkes telah melakukan pemeriksaan berdasarkan audit medis dan otopsi verbal dan hasilnya para pahlawan demokrasi ini meninggal karena memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Senada dengan itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menegaskan bahwa ratusan petugas pemilu yang meninggal disebabkan oleh alasan medis seperti penyakit jantung.

Kisruh dan Gaduh Pemilu

Pemerintah sebaiknya melakukan pemetaan isu paska pemilu berlangsung - walaupun penulis yakin bahwa pemerintah telah melakukannya – Dari isu-isu tersebut akan diberikan kategori tertentu mulai dari ringan (riak kecil yang sifatnya lokal, berkembang sebatas *milieu* para pendukung pasangan calon presiden), moderat (mengancam satu kawasan/wilayah/provinsi, namun punya potensi efek bola salju di kawasan sekitarnya) dan berat (mengancam stabilitas nasional). Akhir-akhir ini sudah semakin sering rakyat mendengar istilah *people power*. Dalam konteks Pemilihan Presiden 2019, *people power* ini merujuk kepada upaya rakyat melakukan *mosi* tidak percaya dan protes keras kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah yang dianggap berlaku tidak demokratis dan curang dalam penyelenggaraan pemilu dengan cara “unjuk kekuatan” bersama rakyat. Adalah Amien Rais, tokoh reformasi yang dihormati, yang awal sekali membuat pernyataan kontroversial ini.

Barangkali pernyataan ini harus dianggap sebagai sebuah peringatan kepada Komisi Pemilihan Umum agar dalam bekerja harus benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas, netralitas dan menjaga kewibawaan sebagai insan yang berintegritas. Sekaligus pernyataan ini boleh jadi mengingatkan pemerintah untuk tidak mengintervensi KPU dengan segala macam cara demi mempertahankan kekuasaan. Sepanjang yang dimaksud adalah benar demikian, pernyataan ini bisa dimaklumi dan dianggap sebagai pesan moral dari seorang guru bangsa. Namun jika maksudnya adalah lain daripada itu, bisa saja menjadi isu yang berkategori mengancam stabilitas nasional dengan mengajak massa/rakyat banyak turun kejalan. Tidak ada yang bisa memastikan ada agenda lain diluar *people power* sebatas aksi protes keras karena dugaan kecurangan yang sangat tidak berkeadilan.

Aksi-aksi *people power* seperti itu, rentan dan mudah sekali disusupi oleh aksi-aksi makar, upaya mengganti pemerintahan yang sah. Walaupun aksi menyatakan kebebasan berekspresi dan berpendapat di jamin oleh undang-undang, namun tetap saja memiliki batasan yang layak. Jika ditemukan ada upaya makar atau setidaknya percobaan upaya makar, tentu ancaman pidana bisa diberikan kepada aktor intelektualnya.

Wajar jika pemerintah mengambil langkah-langkah antisipatif. Langkah awal adalah membuat pernyataan peringatan, tergambar dari komentar Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto “dapat terjadi aksi unjuk rasa atau bahkan penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu yang sudah kami prediksi”. Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, “Ini sekelompok kecil orang, tetapi mengganggu yang lain”. Mantan Kepala BIN, AM. Hendropriyono “WNI keturunan Arab cobalah mengendalikan diri, jangan memprovokasi rakyat.”

Langkah selanjutnya adalah membentuk satuan tugas dengan membentuk tim pengawas pernyataan tokoh di media massa. Tentang ini, Mekopolhukam, Wiranto mengatakan bahwa tim akan mengkaji ucapan, tindakan dan pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum. Langkah berikutnya adalah penegakkan hukum. Langkah ini bukan pekerjaan mudah karena pemerintah harus memperhatikan dengan seksama batas-batas pelanggaran hukum dengan batas-batas hak individu/warga negara untuk berekspresi yang dijamin oleh undang-undang.

Rakyat Tak Perlu Khawatir

Atas berkembangnya isu-isu gerakan *people power* oleh sekelompok elit bangsa bersama dengan rakyat yang mendukungnya, muncul pula kekhawatiran ditengah-tengah masyarakat itu sendiri. Mereka cemas akan situasi yang terjadi jika *people power* melenceng dari gerakan aksi “protes keras”, sehingga keadaan menjadi kacau dan aktivitas keseharian akan terganggu. Masyarakat investor bisa ikut berdampak, mereka khawatir akan jaminan stabilitas dan mengancam investasi mereka. Pengalaman *people power* tahun 1998, memang tidak perlu disamakan dengan *people power* yang kemungkinan akan terjadi, tetapi paling tidak, pemerintah harus memberi kepastian rasa aman dan nyaman kepada seluruh rakyatnya bahwa pemerintah memastikan semua keadaan akan baik-baik saja.

Seruan gerakan *people power* memang semakin menambah riuh gaduh pemilu tetapi gerakan ini tidak boleh serta merta dianggap tabu atau menakutkan apalagi dihentikan rencana aksinya. Gerakan ini sebaiknya dipandang sebagai sebuah dinamika negeri yang benar-benar telah matang berdemokrasi, memberi tempat kebebasan rakyat untuk bersuara dan menghargai hak asasi manusia. Yang perlu dilakukan adalah proses pengawalan yang bukan saja dari pemerintah, tetapi rakyat, baik yang pro gerakan maupun yang tidak setuju dengan gerakan. Masing-masing hendaknya berfikir bahwa anak-anak bangsa sedang merayakan kehidupan demokrasi politik yang sebenarnya. Semoga bangsa ini selalu bersatu.